

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Novia Kencana¹⁾

¹⁾Program Studi Kepemerintahan Universitas Indo Global Mandiri
Jl. Jend. Sudirman No. 629 KM.4 Palembang Kode Pos 30129
Email : novia.kencana@gmail.com¹⁾

ABSTRACT

The purpose of this study was to present the results of recycle trash implementation policy in Ogan Komering Ulu District based on Regulation number 5 year 2009 about recycle trash and constraints faced in recycle trash implementation policy in Ogan Komering Ulu District. This study used qualitative research method and the technique of collecting data through interview, observation and documentation. This study used a model or policy implementation approach of George C. Edward III, namely communication, human resources, disposition and bureaucracy structure to see and know the recycle trash policy implementation in Ogan Komering Ulu District. The results showed that the recycle trash implementation policy in Ogan Komering Ulu District based on Regulation Ogan Komering Ulu district number 5 year 2009 about trash recycle in general were running well, but not optimal. It was because many obstacles that interfere the process of implementation of the policy, namely participation or society awareness who did not really support government policy. Facilities and infrastructure are inadequate and limited budgets by Departement of Hygine and Town Beauty Kota Ogan Komering Ulu made yet optimal implementation of this trash of public service fields.

Keyword: Implementation, Policy, Trash Recycle

1. Pendahuluan

Perkembangan dan pertumbuhan penduduk di suatu daerah telah membawa sebuah perubahan pola perilaku dan pola hidup sekelompok manusia. Perilaku tersebut terkadang memiliki berbagai dampak untuk kelangsungan lingkungan sekitar, baik berupa dampak positif maupun dampak negatif. Tak ubahnya dengan pola perilaku, pertumbuhan penduduk pun telah membuat sebuah perubahan pola konsumsi masyarakat yang menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam.¹

Perubahan pola konsumsi yang menimbulkan sampah atau sisa kegiatan sehari-hari manusia ini telah banyak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Hal tersebut terjadi karena pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan serta belum dikelolanya secara komprehensif dan terpadu agar dapat memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Kemudian agar pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien maka diperlukannya kepastian hukum yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban, dimana setiap orang berhak mendapat pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten,

dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu. Selain itu kebijakan pengelolaan sampah diharapkan dapat menjadi jembatan partisipasi bagi masyarakat dan pemerintah dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan pengelolaan sampah.

Pelayanan publik tentang persampahan ini memang merupakan isu lama yang hampir terjadi di setiap daerah. Namun, masalah sampah ini masih menjadi permasalahan yang cukup krusial dalam hal pengelolaan, kebersihan dan keindahan suatu daerah. Sama halnya dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu ini, permasalahan sampah masih menjadi permasalahan publik yang belum memiliki solusi tepat dalam masalah pengelolaan sampah ini. Hal ini dapat terlihat dengan masih banyaknya sampah yang berserakan dipusat-pusat kota, dipinggir jalan raya, bahkan tempat umum, seperti sekolah, rumah sakit dan pasar. Meskipun Dinas Kebersihan dan Keindahan Kabupaten Ogan Komering Ulu sudah menyebar kotak sampah dipinggir jalan dan dengan adanya petugas kebersihan yang mengambil sampah tiap pagi dan sore, tetapi sampah masih terlihat menumpuk dititik-titik tertentu.

Keseluruhan permasalahan yang muncul dalam pelayanan Kebersihan/Persampahan menjadi semakin krusial ketika semua hak warga tidak terpenuhi sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu nomor 5 tahun 2009 tentang pengelolaan sampah idealnya adalah bagaimana dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara dan sekaligus merupakan perwujudan dari prinsip utama kebijakan desentralisasi yaitu demokratisasi, akuntabilitas publik dan pemberdayaan masyarakat. Dari latar belakang di atas, maka permasalahan dalam

¹ Dalam paparan kunjungan kerja DPRD Kabupaten Tana Tidung dan DPRD Kota Tarakan dengan Pemkot Malang pada 10 juni 2011

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : (1) Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Ogan Komering Ulu? dan (2) Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Ogan Komering Ulu?

Landasan Teori

Secara umum teori merupakan definisi yang dipakai oleh para peneliti untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial ataupun alami. Dengan demikian kerangka teori dapat diartikan sebagai alur logika atau penalaran yang merupakan definisi yang dipakai untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial ataupun alami. Berikut ini akan diuraikan tentang konsep Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah yang secara garis besar adalah sebagai berikut :

Kebijakan Publik

Istilah kebijakan dan kebijaksanaan sering dianggap memiliki pengertian dan makna yang sama oleh sebagian orang. Hal tersebut tentu tidak benar, berbeda dan memiliki makna yang tak sama antar satu sama lainnya. George C.Edward III menyatakan bahwa tidak ada definisi yang tunggal dari kebijakan publik¹ sebagaimana yang dimaksud oleh Dye yang dikutip Young dan Quinn memberikan definisi kebijakan publik secara luas, yakni *“whatever governments choose to do or not to do”*.² Maksudnya kebijakan publik meliputi segala yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.

Hal ini dipertegas oleh Anderson yang juga dikutip oleh Young dan Quinn, menyampaikan definisi kebijakan publik yang relative lebih spesifik, yaitu sebagai *“a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern.”*³ Menurut Hoogerwerf pada hakekatnya pengertian kebijakan adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah, merupakan upaya untuk memecahkan, mengurangi, mencegah suatu masalah dengan cara tertentu, yaitu dengan tindakan yang terarah.⁴

Berdasarkan beberapa pengertian tentang kebijakan yang telah dikemukakan oleh para ilmuwan diatas tersebut, kiranya dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pada hakikatnya studi tentang kebijakan mencakup pertanyaan : *what, why, who, where, dan how*. Semua pertanyaan itu menyangkut tentang masalah yang dihadapi lembaga-lembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut isi, caara atau prosedur yang

ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan.

Konsep Implementasi Kebijakan

George C. Edwards III mendefinisikan implementasi sebagai tahap pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan, seperti halnya pasal-pasal, pengeluaran sebuah peraturan eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan atau keluarnya suatu standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat dan mempengaruhi beberapa aspek kehidupan.⁵

Implementasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh berbagai aktor dengan sarana-sarana pendukung berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada beberapa proses kebijakan, umumnya kebijakan yang merupakan implementasi harus dilakukan secara efektif dan efisien. Namun, dalam kenyataannya kemungkinan bisa terjadi adanya kendala dan penyimpangan pada saat implementasi oleh pelaksana.

Dalam penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Ogan Komering Ulu model implementasi yang digunakan adalah Model George C.Edward III. George menjelaskan ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan :

1. Komunikasi, diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator dengan komunikan. Komunikasi yang dilakukan merupakan komunikasi yang dibangun dan berlangsung baik didalam maupun diluar area organisasi tersebut antara pelaksana kebijakan yang ditunjuk dalam pelaksanaan pengadaan.
2. Sumber daya, sumber-sumber yang mendukung dan digunakan dalam implementasi suatu kebijakan.
3. Disposisi, kecenderungan dan kemauan untuk melaksanakan kebijakan.
4. Struktur birokrasi, implementasi kebijakan yang dilaksanakan tidak akan berlangsung dengan efektif jika masih terdapat ketidakefisienan dalam struktur birokrasi.

Konsep Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 5 Tahun 2009 Tentang pengelolaan sampah. dijelaskan tentang kewenangan pemerintah kabupaten Ogan Komering Ulu dalam menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi. Dan masyarakat mendapat hak untuk mendapat pelayanan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu.

¹ Edwards III., George C (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC : Congressional Quaterly. Inc. hal.2

² Young dan Quinn dalam Suharto, Edi. 2008. *Analisis Kebijakan Publik : Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung : Alfabeta.hal.22

³ Ibid, hal 23

⁴ Hoogerwerf dalam Sjahrir.1988. *Kebijaksanaan Negara : Konsistensi dan Implementasi*. Jakarta : LP3ES. hal. 66

⁵ Edwards III., George C (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC : Congressional Quaterly. Inc. hal.111

Dalam kaitannya dengan pelayanan publik di bidang pengelolaan pemerintah telah menetapkan kebijakan publik yang mengarah pada kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang optimal menjadi sangat penting untuk dilakukan. Pelayanan publik harus memperoleh perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh, karena merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap aparatur pemerintahan. Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki implikasi yang luas dalam berbagai aspek kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu upaya penyempurnaan pelayanan publik harus dilakukan secara terus menerus, berkelanjutan dan dilaksanakan oleh jajaran aparatur pemerintah daerah.

Mengingat Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan sebuah kota yang memiliki tingkat mobilitas yang tinggi di bidang ekonomi khususnya industri dan perdagangan. Oleh sebab itu pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah kota akan terus meningkat. Hal ini sejalan dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 5 Tahun 2009 Tentang pengelolaan sampah yang menjadi acuan masyarakat sekitar untuk memperoleh pelayanan di bidang persampahan guna kelangsungan lingkungan dan kesehatan bagi warga kota itu sendiri.

Metodologi Penelitian

Penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Ogan Komering Ulu ialah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

Unit Analisis

Unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Subjek penelitian tersebut dapat berupa benda atau manusia. Berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah kelompok masyarakat yang menjadi objek sebagai penerima pelayanan publik di Bidang Persampahan.

Populasi, Sampel Dan Key Informant

Dalam penelitian ini, populasi didefinisikan sebagai jumlah atau kesatuan individu yang memiliki beberapa kesamaan ciri atau sifat, dan kepada merekalah kesimpulan penelitian ini diberlakukan. Populasi dalam penelitian ini adalah sejumlah masyarakat yang tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu dan juga pemerintah setempat yang terkait sebagai pelaku Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Ogan Komering Ulu 5 Tahun 2009 Tentang pengelolaan sampah.

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.¹ Teknik sampel yang digunakan adalah teknik sampel incidental yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang

yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Key informant adalah informasi dari orang-orang atau masyarakat yang memiliki pengetahuan luas yang memberikan layanan untuk membantu peneliti dalam menyelesaikan observasinya. Adapun key informant yang membantu dalam penyelesaian proposal penelitian ini ialah warga atau masyarakat yang menjawab questioner, relawan masyarakat, orang-orang terlatih dalam bidang pelayanan publik dan otonomi daerah, serta sumber tambahan dalam bentuk pustaka.

Teknik Analisis Data

Unit analisis dalam penelitian ini dilakukan pada tingkat kelompok dan masyarakat sekitar Kabupaten Ogan Komering Ulu. Interpretasi data dilakukan dengan analisis deskriptif-kualitatif bukan untuk mengeneralisasi dari data-data yang didapat, tetapi hanya untuk menggambarkan varians-varians dalam kerangka holistik dari realitas sosial mengenai pelayanan publik dalam rangka pengimplementasian Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 5 Tahun 2009 Tentang pengelolaan sampah.

Analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan, yaitu : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data berlangsung terus selama proses penelitian yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi yang merupakan rangkuman inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga keaslian datanya, sehingga tidak merubah makna sebenarnya. Langkah kedua, penyajian data adalah menyusun data serangkaian informasi yang memungkinkan untuk penarikan kesimpulan. Tahap akhir dari proses analisis adalah penarikan kesimpulan, dalam penelitian ini hanya bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ketiga kegiatan tersebut saling berkaitan dan berlangsung terus menerus mulai sebelum, saat dan sesudah pengumpulan data.

2. Pembahasan

Bab ini akan membahas mengenai Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 5 Tahun 2009 Tentang pengelolaan sampah. Kajian ini sekaligus merupakan jawaban dari permasalahan yang diteliti, didasarkan pada data-data yang didapat baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui bahan tertulis yang diperoleh saat penelitian. Hasil analisis terhadap data-data inilah yang nantinya diharapkan dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi serta dapat menarik suatu kesimpulan dari hasil analisis yang diperoleh.

Kajian ini menggunakan model atau pendekatan implementasi kebijakan dari George C. Edward III sebagai acuan dalam melihat dan mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan Peraturan

¹ Sugiyono.2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung. Alfabeta. hal-91

Daerah kabupaten Ogan Komering Ulu nomor 5 tahun 2009 Tentang pengelolaan sampah. Setelah itu dilanjutkan dengan kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan pengelolaan Sampah di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Ogan Komering Ulu

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Ogan Komering Ulu ini menganalisis penerapan konkret dalam penyelenggaraan pengadaan pelayanan publik di bidang pengelolaan sampah melalui Peraturan Daerah kabupaten Ogan Komering Ulu nomor 5 tahun 2009 Tentang pengelolaan sampah.

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah

Berdasarkan isi dari Peraturan Daerah kabupaten Ogan Komering Ulu nomor 5 tahun 2009 Tentang pengelolaan sampah ini, banyak terdapat ketentuan-ketentuan bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi. Selain itu, didalam peraturan itu juga terdapat hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah atau pihak yang diberi tanggung jawab untuk itu. Selain itu masyarakatpun dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasaan dibidang pengelolaan sampah serta mendapat perlindungan dari dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah.

Penerapan Model Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Ogan Komering Ulu

Dalam proses implementasi kebijakan terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Sebagaimana yang disampaikan oleh George C. Edward III, ada empat faktor berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, yaitu faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Komunikasi

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Penyampaian informasi tersebut biasanya berupa penyampaian pesan antar manusia. Komunikasi yang berlangsung pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kabupaten Ogan Komering Ulu telah berlangsung secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal komunikasi tersebut berlangsung antara atasan dan bawahan, antara pemerintah dan masyarakat. Kemudian, secara horizontal komunikasi yang dibangun antara sesama staff atau pun antar kelompok masyarakat dalam memperoleh informasi tentang pelayanan publik bidang persampahan ini telah berjalan dengan lancar. Namun, terkadang

sering juga terjadi *miss communication* diantara atasan dan bawahan seperti salah persepsi terhadap sesama pegawai hingga faktor-faktor manusiawi seperti lupa, salah mengartikan perintah atasan dan lain-lain. Sedangkan, komunikasi secara vertikal maupun horizontal yang terjadi antara pihak pemerintah dan masyarakat belum berjalan dengan baik. Hal ini di tinjau dari kurangnya sosialisasi yang diberikan pihak Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota pada masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu serta kurangnya ruang untuk menyampaikan masukan dan pendapat dari masyarakat itu sendiri.

2. Sumber daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Sumber daya juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu atau asset yang dimiliki suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan. Sumber daya itu sendiri dalam proses implemetasi kebijakan sangat mutlak diperlukan untuk mencapai tujuan kebijakan. Sebaik apapun sebuah kebijakan yang dihasilkan jika dilaksanakan tanpa adanya sumber daya yang akan mendukung, akan sangat mustahil implementasi kebijakan tersebut akan terlaksana dengan baik. Untuk instansi Dinas kebersihan dan keindahan Kota yang khusus menangani masalah pengelolaan sampah di Kabupaten OKU, secara kuantitas dan telah memenuhi persyaratan idealnya sebuah instansi. Namun secara kualitas kerja berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti pada saat dilapangan menunjukkan kinerja pegawai belum optimal.

3. Disposisi

Untuk disposisi yang berlangsung pada Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Ogan Komering Ulu dapat dilihat dari sikap dan kemauan dari para pelaksana kebijakan yang terlibat pada pelaksanaan kegiatan guna mewujudkan pelayanan publik dibidang persampahan di kalangan masyarakat kabupaten Ogan Komering Ulu.

4. Struktur Birokrasi

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan diperlukan struktur birokrasi yang jelas untuk dapat mengimplementasikan suatu kebijakan dengan efektif. Tanpa adanya struktur birokrasi yang jelas akan mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan. Pada saat berlangsungnya Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu nomor 5 tahun 2009 Tentang pengelolaan sampah telah didukung dengan struktur birokrasi yang jelas. Kejelasan tersebut dapat dilihat dari adanya prosedur kerja dan koordinasi tugas yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Kab.

Prosedur yang dibuat oleh DKK OKU mampu mengatur dan mengarahkan kepada pembagian kerja masing-masing bidang. Dimana dalam DKK OKU terbagi menjadi Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang Kebersihan, Bidang Keindahan, Bidang Keindahan, Bidang Pengelolaan Sampah dan Kelompok Jabatan

Fungsional. Dimana untuk bidang sampah terbagi menjadi tiga seksi, yaitu seksi Pengelolaan Sampah, seksi Pemanfaatan dan Pemusnahan Sampah dan seksi Sarana dan Prasarana. Pembagian bidang melalui struktur birokrasi ini telah memenuhi standar ideal sebuah prosedur dan spesialisasi kerja. Dimana spesialisasi bidang ini merupakan upaya awal DKK Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk dapat menangani permasalahan pengelolaan sampah secara spesifik sehingga prosedur kerja yang ada tersebut diharapkan dapat mengatur dan mengarahkan segala tindakan yang dilakukan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan efektif. Sedangkan dari hasil penelitian di DKK Kabupaten OKU untuk koordinasi tugas intern antar bidang dan seksi yang ada di DKK Kabupaten Ogan Komering Ulu sudah cukup baik namun dilihat dari koordinasi tugas DKK Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan ekstern Dinas atau organisasi belum terlalu mendukung.

Faktor-Faktor Yang Menghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Ogan Komering Ulu

Pada saat berlangsungnya implementasi suatu kebijakan biasanya sering dijumpai sejumlah hambatan yang mengganggu pelaksanaan kebijakan tersebut. Seperti halnya pada Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Ogan Komering Ulu ditemukan sejumlah hambatan yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Kesulitan-kesulitan itu antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Partisipasi masyarakat yang kurang
2. Perlengkapan yang minim
3. Terbatasnya anggaran yang dimiliki

3. Kesimpulan

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Ogan Komering Ulu secara umum sudah cukup berjalan dengan baik namun belum optimal. Hal tersebut dikarenakan masih terdapatnya sejumlah hambatan yang mengganggu jalannya implementasi kebijakan tersebut secara lebih rinci kesimpulan tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Ogan Komering Ulu didukung oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi Implementasi kebijakan tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.
 - a. Komunikasi yang berlangsung selama implementasi kebijakan tersebut berjalan dengan baik. Para pelaksana kebijakan saling berkomunikasi satu sama lainnya dalam melaksanakan pekerjaannya. Sehingga faktor komunikasi tersebut sangat mendukung Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Namun, terkadang sering juga terjadi *miss communication* diantara atasan dan bawahan seperti salah

persepsi terhadap sesama pegawai hingga faktor-faktor manusiawi seperti lupa, salah mengartikan perintah atasan dan lain-lain.

- b. Faktor sumber daya seperti sumber daya manusia, sumber dana dan fasilitas semuanya mendukung implementasi kebijakan tersebut dalam pelaksanaan mewujudkan pelayanan publik walaupun pada faktor sumber daya ditemukan adanya sedikit kesulitan seperti kurangnya fasilitas sarana dan prasarana dilapangan dan kurangnya komitmen dari para pelaksana.
 - c. Selanjutnya pada faktor disposisi dijumpai kemauan dan sikap yang baik untuk melaksanakan kebijakan tersebut di dalam pelaksanaan pelayanan publik bidang persampahan tersebut.
 - d. Implementasi kebijakan tersebut tidak lepas dari dukungan struktur birokrasi yang ada seperti adanya prosedur kerja dan koordinasi yang baik diantara pelaksana kebijakan tersebut. Sehingga dengan demikian Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Ogan Komering Ulu telah berlangsung dengan baik yang dapat dilihat dari sejumlah faktor pendukung yang membantu implementasi kebijakan tersebut.
2. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Ogan Komering Ulu masih dijumpai beberapa hambatan. Hambatan tersebut berupa :
 - a. Partisipasi masyarakat yang kurang dalam mewujudkan kebijakan otonomi daerah terhadap pelayanan publik bidang persampahan. Hal ini merupakan salah satu kendala terbesar yang dialami oleh Dinas Kebersihan dan Keindahan Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam mewujudkan Kabupaten yang bersih dan bebas dari sampah.
 - b. Perlengkapan sarana dan prasarana yang belum memadai membuat kinerja Dinas Kebersihan dan Keindahan Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam mewujudkan Kabupaten yang bersih dan bebas dari sampah sedikit terhambat.
 - c. Terbatasnya anggaran/dana yang dimiliki oleh Dinas Kebersihan dan Keindahan Kabupaten Ogan Komering Ulu membuat belum optimalnya pelaksanaan pelayanan publik bidang persampahan ini.

Saran

Masih dijumpai beberapa hambatan pada Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Ogan Komering Ulu menuntut masukan saran yang dapat dilakukan untuk masa yang akan datang. Adapun saran-saran yang dapat diberikan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi dan penyuluhan tentang kebersihan dan dampak-dampak negatif yang dihasilkan oleh sampah yang tidak dikelola dengan baik merupakan salah satu solusi untuk menarik partisipasi dari masyarakat sekitar. Banyaknya masyarakat yang

- belum berpartisipasi dalam proses kebersihan dan pengelolaan sampah dikarenakan belum ada kesadaran dari masyarakat itu sendiri
2. Penambahan jumlah perlengkapan dan sarana-prasarana seperti armada angkutan, bak sampah dan sebagainya dapat semakin memaksimalkan pelayanan publik dibidang persampahan ini.
 3. Anggaran yang cukup akan semakin membuat pelaksanaan pelayanan publik ini semakin maksimal. Oleh karena itu, bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah dengan berupa anggaran ataupun dana dapat semakin membuat pelayanan publik dibidang persampahan ini berjalan dengan lancar

Daftar pustaka

- [1] Agustina, Leo.2006. *Dasar-dasar kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- [2] Edwards III., George C (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC : Congressional Quaterly. Inc.
- [3] Hoogerwerf (1983). *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT.Gramedia.
- [4] Setyawan Salam., Dharma,M.Ed (2004) *Otonomi Daerah, dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya*. Bandung: Djambatan.
- [5] Singarimbun, Masri & Effendi, Sofian (1995). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES
- [6] Sjahrir.1988. *Kebijaksanaan Negara : Konsistensi dan Implementasi*. Jakarta : LP3ES.
- [7] Sugiyono.2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung. Alfabeta.
- [8] Suharto, Edi. 2008. *Analisis Kebijakan Publik : Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung : Alfabeta.
- [9] Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 *Tentang Pengelolaan Sampah*.
- [10] Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 5 Tahun 2009 *Tentang Pengelolaan Sampah*.
- [11] Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 16 Tahun 2011 *Tentang Retribusi Jasa Umum*.